

## **B A B V**

---

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Untuk itu diperlukan adanya tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengikuti tahapan RPJPN dan RPJPP maka RPJPD Kabupaten Empat Lawang dimulai pada Tahun 2008 - 2025 tetapi tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

#### **5.1. TUJUAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 2008-2025**

Dari penjelasan atas misi pembangunan, maka dapat dirumuskan tujuan pembangunan dan sasaran pokok yang hendak dicapai Kabupaten Empat Lawang selama periode 2008-2025. Tujuan pokok dijabarkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, dan sasaran

pokok merupakan langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

**Tabel. 5.1**  
**Misi, Tujuan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang**  
**Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN POKOK</b>	
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan kecerdasan, kesehatan, ketrampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat yang berbudaya dan bermartabat	1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, berbudaya dan bermartabat
		1.2	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
		1.3	Meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
		1.4	Meningkatkan kualitas hidup, kesempatan dan perlindungan perempuan, serta keterjaminan anak dalam keluarga sejahtera
		1.5	Mengendalikan perkembangan penduduk
		1.6	Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat
		1.7	Meningkatkan peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan dan olah raga
2. Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan perekonomian daerah secara mandiri mandiri	1.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
		2.	Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar
		3.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi ketahanan pangan nasional
		4.	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja

3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, Harmonis dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaannya dalam memelihara kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat	1.	Meningkatkan kualitas penataan ruang
		2.	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
		3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kabupaten yang Memadai dan Sesuai Perkembangan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dan pemerataan pembangunannya di seluruh wilayah kabupaten	1.	Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar kota
		2.	Meningkatkan pelayanan fasilitas ekonomi kota
		3.	Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )	Pewujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi meningkatkan pelayanan publik yang prima	1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
		2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		3.	Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah
		4.	Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi
		5.	Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat
		6.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum

## 5.2. TAHAPAN, PRIORITAS, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

### JANGKA PANJANG

#### 5.2.1. RPJMD Ke-1 (2008-2013)

Pembangunan jangka menengah periode Tahun 2008-2013 ditujukan untuk **menyiapkan keunggulan daerah**, yaitu dalam rangka mempersiapkan kekuatan dan kemampuan potensi dan

sumberdaya daerah yang akan menjadi pondasi menuju kondisi Kabupaten Empat Lawang **yang mandiri**. Pembangunan pada periode Tahun 2008-2013 menekankan pada upaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan (*core competencies*) daerah; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kota; meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; mewujudkan keserasian dan keharmonisan masyarakat kota yang berbudaya; menyediakan dan meningkatkan pelayanan dasar (*basic services*) di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta utilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan bagi masyarakat; menyediakan permukiman dan perumahan layak huni bagi masyarakat; membangun SDM (aparatur pemda, DPRD, dan masyarakat), organisasi, dan sistem manajemen pemerintahan, yang didukung sarana prasarana pemerintahan yang memadai; membangun karakter mulia segenap *stakeholders* pembangunan kota; membangun dan meningkatkan keharmonisan hubungan antar *stakeholders* pembangunan; menciptakan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat serta sistem kewaspadaan masyarakat terhadap situasi tanggap darurat; menciptakan pola kesinambungan dan keseimbangan ekologi dalam pembangunan; dan membangun kesadaran ekologis (*ecological awareness*) masyarakat dalam pembangunan.

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2013 ditujukan pada upaya sebagai berikut:

## **1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada: Percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun; Rintisan wajib belajar dua belas tahun; Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar; Rintisan sekolah berstandar nasional/internasional; Pemberantasan buta aksara; Peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis; Pengembangan puskesmas dan rumah sakit; Peningkatan surveilans epidemiologi; Promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan; Peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama; Penanaman nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat.

## **2. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Prioritas pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin; Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk.

### **3. Peningkatan Kualitas Perekonomian**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian ditekankan pada : Peningkatan kesejahteraan petani; Perbaikan infrastruktur pendukung pertanian; Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian; Pengendalian alih fungsi lahan pertanian; Peningkatan produktivitas pertanian; Pengembangan sistem agribisnis pertanian; Penguatan struktur industri; Peningkatan kesempatan kerja di sektor industri; Pendayagunaan potensi lokal; Pengembangan industri potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar; Penyiapan pranata UMKM dan Koperasi; Penataan objek dan daya tarik wisata; Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; Penyiapan prasarana dan sarana iklim investasi; Inventarisasi dan promosi potensi investasi; Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; Perbaikan hubungan industrial.

### **4. Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Publik**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur

wilayah; Penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, Pengembangan kelembagaan pengelola; Pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pelayanan prasarana dan sarana.

## **5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Peningkatan kualitas penataan ruang; Peningkatan daya dukung lingkungan; Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan; Penyediaan berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan; Pengembangan upaya mitigasi bencana.

## **6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Penataan organisasi perangkat daerah; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai; Penguatan unit-unit pelayanan publik; Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan; Peningkatan efektivitas dan daya guna keuangan daerah; Penurunan tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas; Penataan hukum daerah; Penciptaan landasan hukum

untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah; Penguatan semangat kebangsaan; Pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi.

### **5.2.2. RPJMD Ke-2 (2014-2018)**

Pembangunan jangka menengah periode Tahun 2014-2018 ditujukan untuk **memantapkan keunggulan daerah, ketenteraman sosial, dan peningkatan kualitas hidup dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat**, yaitu membagi apa yang sudah dicapai dari hasil pembangunan pada periode sebelumnya. Pembangunan pada periode Tahun 2014-2018 menekankan **pada upaya peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan sosial, peningkatan kualitas penataan ruang, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan, percepatan peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan, peningkatan investasi dan pemberdayaan KUKM, serta pemantapan tata kelola pemerintahan daerah.**

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014-2018 ditujukan pada upaya sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada : Penuntasan wajib belajar

sembilan tahun; Akselerasi penuntasan wajib belajar dua belas tahun; Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah; Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal; Pengembangan sekolah berstandar nasional/internasional; Penuntasan buta aksara; Peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat; Pengembangan sistem kesehatan; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak; Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; Peningkatan pelestarian dan pemahaman nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat.

## **2. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Prioritas pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin; Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan

perlindungan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan; Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah.

### **3. Peningkatan Kualitas Perekonomian**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian ditekankan pada : Pemantapan sistem agribisnis pertanian; Peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri; Peningkatan kemitraan antar industri; Pengembangan industri-industri andalan sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah; Penataan distribusi barang yang efektif dan efisien; Peningkatan ekspor produk daerah; Peningkatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi; Pengembangan inkubator bisnis UMKM dan Koperasi; Pengembangan produk wisata unggulan; Peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata berstandar internasional; Peningkatan iklim investasi yang kondusif; Pengembangan kerjasama investasi; Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; Pemantapan unsur tripartit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja.

#### **4. Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas**

##### **Publik**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada :  
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Operasionalisasi pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah; Pengembangan sistem transportasi masyarakat yang baik; Peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana.

#### **5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan**

##### **Lingkungan Hidup**

Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada :  
Aktualisasi pemanfaatan ruang yang serasi; Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; Pemantapan pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; Pengembangan perilaku ramah lingkungan; Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan; Peningkatan upaya mitigasi bencana.

## 6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Penataan organisasi perangkat daerah; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai; Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi; Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek; Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan; Peningkatan efektivitas dan daya guna keuangan daerah; Pendayagunaan aset-aset daerah; Pembangunan sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat; Penataan hukum daerah; Pembangunan budaya hukum; Pemantapan kehidupan demokrasi; Pemantapan semangat kebangsaan; Pemantapan peran dan fungsi partai politik; Penguatan peran masyarakat madani (*civil society*); Pengembangan kelembagaan demokrasi.

### 5.2.3. RPJMD Ke-3 (2019-2023)

Pembangunan jangka menengah periode Tahun 2019-2023 ditujukan sebagai **persiapan menuju kondisi Kabupaten Empat Lawang yang maju**, dengan berbekal pencapaian kondisi kemandirian daerah yang menjadi orientasi pada tahapan pembangunan sebelumnya. Pembangunan pada periode Tahun 2014-2018 menekankan pada upaya peningkatan daya saing

kompetitif perekonomian; pembentukan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian penggunaan lahan; pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019-2023 ditujukan pada upaya sebagai berikut:

### **1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada : Perintisan wajib belajar dua belas tahun; Peningkatan kualitas lembaga PAUD formal dan non formal; Pengembangan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat; Peningkatan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional, budaya dan

kearifan lokal masyarakat sebagai faktor penyeimbang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin; Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas; Pemantapan sistem administrasi kependudukan; Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah.

## **3. Pemantapan Kualitas Perekonomian**

Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan kualitas perekonomian ditekankan pada : Pemantapan sistem agribisnis pertanian; Pemantapan mutu produk pertanian; Pengembangan teknologi pertanian; Penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif; Pengembangan kemampuan inovasi; Peningkatan kemampuan sumber daya industri; Pengembangan industri kecil yang tangguh; Perluasan kawasan perdagangan ekspor; Penataan distribusi barang; Pemberdayaan produk dalam negeri dan

pengembangan pasar dalam negeri; Peningkatan kualitas, daya saing serta kehandalan UMKM dan Koperasi; Penciptaan destinasi wisata; Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi; Perluasan kerjasama investasi; Pemantapan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; Pemantapan unsur tripartit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja.

#### **4. Pemantapan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Publik**

Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah; Pemantapan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Pengembangan sistem transportasi masyarakat yang baik; Perluasan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana.

#### **5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang; Peningkatan potensi sumber daya alam dan

fungsi lingkungan hidup; Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan; Peningkatan perilaku ramah lingkungan; Pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan konsistensi penegakan hukum dalam pengendalian lingkungan; Peningkatan efisiensi dan efektivitas nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

## **6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada :  
Pemantapan profesionalitas aparatur didukung oleh penataan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan;  
Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Pengembangan budaya organisasi berorientasi pelayan; Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya; Peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah; Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah; Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; Optimalisasi potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; Pemantapan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM);

Harmonisasi produk hukum; Perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat; Peningkatan budaya hukum; Perwujudan demokrasi pada proses politik; Pemantapan semangat kebangsaan; Pengembangan kemandirian partai politik; Pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*); Perluasan akses partisipasi publik.

#### **5.2.4. RPJMD Ke-4 (2024-2025)**

Pembangunan jangka menengah periode Tahun 2024-2025 merupakan **tahap pemantapan kedudukan Kabupaten Empat Lawang sebagai 'Kabupaten Mandiri dan Maju' yang strategis.**

Pembangunan pada periode Tahun 2024-2025 menekankan pada upaya pemantapan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2025 ditujukan pada upaya sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia ditekankan pada : Penuntasan wajib belajar dua belas tahun; Perintisan wajib belajar lima belas tahun;

Peningkatan kualitas lembaga PAUD formal dan non formal;  
Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal berskala nasional dan internasional;  
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional; Peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat;  
Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;  
Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan; Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan; Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi); Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan; Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat; Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagai faktor penyeimbang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditekankan pada : Jaminan sosial pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin;  
Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial

perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; Peningkatan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pengendalian pertumbuhan penduduk; Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga; Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah.

### **3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian ditekankan pada : Pemantapan sistem agribisnis pertanian; Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian; Perkuatan potensi industri strategis; Penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar; Pengoptimalan pendayagunaan potensi lokal; Perluasan jaringan perdagangan luar negeri; Pengembangan jaringan kelembagaan UMKM dan Koperasi; Peningkatan kehandalan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah; Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata; Pengembangan kelembagaan pariwisata; Penataan destinasi pariwisata; Penciptaan daya tarik wisata; Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja; Penumbuhkembangan hubungan industrial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

#### **4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Publik**

Prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota ditekankan pada : Pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah; Pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah; Pemantapan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah; Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada; Pengembangan sistem transportasi massal yang baik; Pemantapan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana.

#### **5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

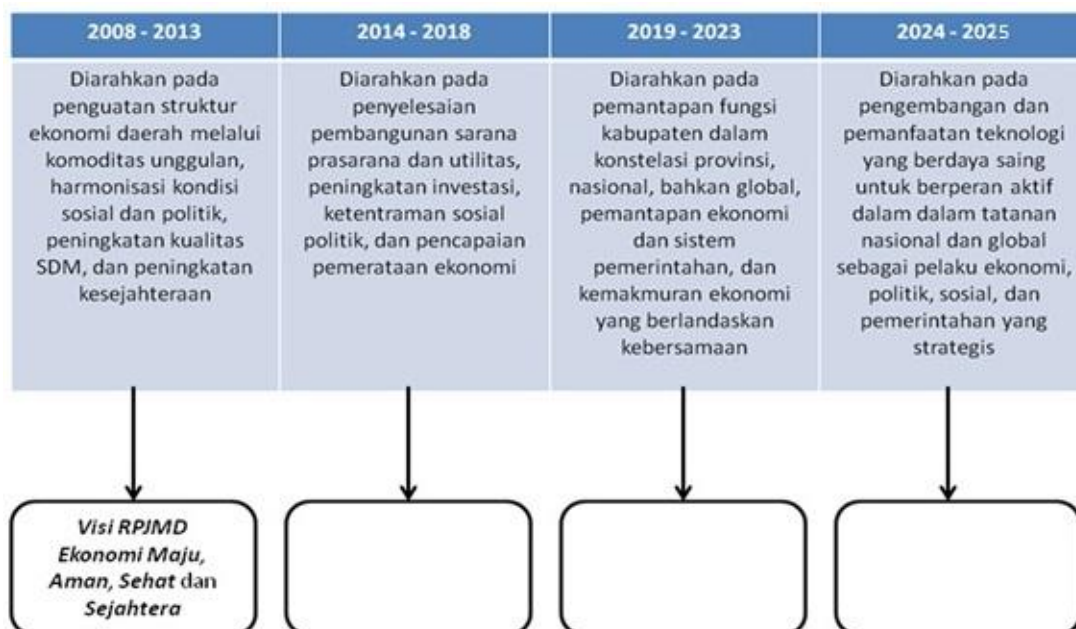
Prioritas pembangunan dalam rangka pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ditekankan pada : Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang; Peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup; Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan; Pembudayaan perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat; Pemantapan sistem pemantauan, pengendalian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan konsistensi penegakan hukum dalam

pengendalian lingkungan; Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

## **6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Prioritas pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditekankan pada : Penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayanan serta budaya organisasi; Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Peningkatan daya guna dan hasil guna kekayaan dan aset daerah; Optimalisasi potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; Harmonisasi produk hukum; Pemantapan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM); Perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat; Penanaman budaya taat hukum di masyarakat; Pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*).

**GAMBAR 5.1**  
**SKEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008-2025**



**Tabel 5.2.**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Empat Lawang**  
**\*Tahun 2008-2025**

No.	Sasaran Pokok	Urusan	Arah Kebijakan
1	1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, berbudaya dan bermartabat	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan implementasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>• Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah</li> <li>• Mencanangkan pembangunan fasilitas agama, seni dan budaya</li> <li>• Melakukan pendataan dan pengelolaan serta pelestarian peninggalan budaya lokal</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong inovasi dan kreasi pengembangan seni budaya</li> <li>• Memajukan pendidikan agama di lingkungan sekolah yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang mulia</li> <li>• Memajukan dan memotivasi program pembinaan keagamaan pada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintahan.</li> </ul>
	1.2. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan masyarakat yang mampu membaca dan menulis</li> <li>• Meningkatkan kualitas guru sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>• Mendorong peningkatan ketertarikan masyarakat baik lulusan SD, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi</li> <li>• Membangun perpustakaan daerah dan meningkatkan kualitas serta kuantitasnya sampai ke wilayah pedesaan</li> <li>• Meningkatkan keberadaan institusi formal dan nonformal</li> <li>• Menciptakan ketertarikan masyarakat untuk mengerti dan menerapkan penggunaan bahasa asing dan penggunaan teknologi</li> <li>• Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan</li> <li>• Meningkatkan peran serta masyarakat, orang tua, da</li> </ul>

			<p>swasta dalam pembangunan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</li> </ul>
	1.3. Meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga di bidang kesehatan</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan yang tersedia</li> <li>• Meningkatkan informasi layanan kesehatan hingga ke tingkat desa</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang kesehatan</li> <li>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan</li> <li>• Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi di bidang kesehatan</li> </ul>
	1.4. Meningkatkan kualitas hidup, kesempatan dan perlindungan perempuan, serta keterjaminan anak dalam keluarga sejahtera	<p>- Sosial</p> <p>- Pemberdayaan Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas hidup dan taraf kesejahteraan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</li> </ul>

	1.5. Mengendalikan perkembangan penduduk	Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk</li> <li>• Peningkatan kualitas dan tertib administrasi kependudukan sebagai kebutuhan dasar</li> <li>• Peningkatan kinerja program keluarga berencana</li> </ul>
	1.6. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat agar dapat menunjang perekonomian dan berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang lain</li> <li>• Mempermudah akses mendapatkan modal kerja bagi perkembangan usaha kecil menengah</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha</li> </ul>
	1.7. Meningkatkan peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan dan olah raga	Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet berprestasi</li> <li>• Menyediakan fasilitas untuk olahraga bagi masyarakat umum</li> <li>• Meningkatkan minat pemuda dalam kegiatan olahraga.</li> <li>• Mengikutsertakan perkumpulan pemuda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan</li> <li>• Meningkatkan peran serta pemuda dalam pengambilan keputusan publik</li> </ul>
2	2.1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri</li> <li>- Koperasi dan UMKM</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Penanaman modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa perbankan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang dapat memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri</li> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan pelaku kegiatan ekonomi daerah dan regional</li> <li>• Meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan produksi</li> <li>• Mengelompokkan dan mengembangkan kawasan yang menjadi kawasan perdagangan</li> <li>• Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKN dan industri kreatif</li> <li>• Meningkatkan kondisi iklim investasi yang menarik dan mempermudah investor</li> </ul>
	2.2. Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan</li> <li>- Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian untuk memicu pertumbuhan sektor lainnya</li> <li>• Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi pertanian guna peningkatan produksi</li> <li>• Meningkatkan produksi pertanian dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi</li> <li>• Mendorong tumbuhnya industri hilir dan hulu bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>• Pemeliharaan kualitas sumber daya alam</li> <li>• Revitalisasi kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menumbuhkembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>• Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam rangka peningkatan kualitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>• Meningkatkan promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan dan peternakan</li> </ul>
	2.3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kontribusi ketahanan pangan nasional	Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu dan keamanan pangan daerah</li> <li>• Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan</li> <li>• Pengembangan sistem distribusi pangan yang efektif</li> <li>• Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin</li> </ul>
	2.4. Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keterampilan pencari kerja</li> <li>• Perluasan lapangan kerja baik sektor formal maupun nonformal</li> <li>• Meningkatkan manajemen sistem keselamatan kerja</li> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha</li> <li>• Menciptakan hubungan industri yang harmonis</li> </ul>

3	3.1. Meningkatkan kualitas penataan ruang	Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kawasan lindung sebagai kawasan nonbudi daya yaitu kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan data spasial</li> <li>• Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang</li> <li>• Meningkatkan perencanaan tata ruang</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah</li> <li>• Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang</li> <li>• Mengoptimalkan pemantauan ruang</li> <li>• Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Empat Lawang</li> <li>• Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaannya</li> </ul>
	3.2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana</li> <li>• Mencegah terjadinya kebakaran hutan</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan</li> <li>• Memperkuat kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola</li> </ul>

			<p>sumber daya air dan kawasan lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan</li> <li>• Meningkatkan sistem informasi sumber daya alam</li> <li>• Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan</li> <li>• Mengurangi potensi kerusakan hutan dan lahan</li> <li>• Meningkatkan potensi di bidang kegeologian</li> <li>• Meningkatkan upaya konservasi lingkungan</li> </ul>
	3.3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan</li> <li>• Menetapkan regulasi untuk mengurangi potensi penambahan daerah rawan bencana</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan</li> <li>• Menerapkan penggunaan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengelolaan lingkungan</li> </ul>
4	4.1. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar kota	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan</li> <li>• Meningkatkan pembangunan bronjong dan tembok penahan pada daerah rawan longsor</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sistem jaringan drainase pada daerah rawan banjir dan mengurangi genangan air</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan (penerangan jalan)</li> </ul>
	4.2. Meningkatkan pelayanan fasilitas ekonomi kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur</li> <li>- ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar kota dan pasar desa</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana produksi</li> <li>• Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah guna memperlancar mobilitas faktor-faktor produksi</li> <li>• Meningkatkan pembangunan kawasan strategis agropolitan dan kawasan strategis pariwisata</li> </ul>
	4.3. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur</li> <li>- Permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase</li> <li>• Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Skala Regional</li> <li>• Mengoptimalkan kinerja aparaturnya pengelolaan sampah</li> <li>• Meningkatkan pembangunan MCK di setiap desa</li> <li>• Pembuatan alat sanitarian</li> <li>• Pembangunan jalan desa</li> </ul>
5	5.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya dan untuk mewujudkan</li> </ul>

		Kepegawaian dan Persandian	<p>tata kelola pemerintahan yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien</li> <li>• Mempermudah akses publik untuk keterlibatan dalam proses pembangunan</li> <li>• Pengoptimalisasian penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur dengan penerepan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>• Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• Perencanaan dan pelaksanaan program dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel</li> <li>• Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme</li> <li>• Mengimplementasikan sisdur, reward, dan punishment pegawai</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan</li> </ul>
	5.2. Meningkatkan kualitas pelayanan public		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimum</li> <li>• Meningkatkan kemudahan aksesibilitas publik untuk memperoleh pelayanan umum</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun UPTD secara terpadu</li> </ul>
	5.3. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan dan pengelolaan yang efektif atas sumber-sumber pendapatan asli daerah</li> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal pembiayaan pembangunan</li> <li>• Penganggaran kegiatan pembangunan secara efisien dan berbasis kinerja</li> <li>• Meningkatkan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif</li> </ul>
	5.4. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	Kesatuan bangsa dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan demokrasi yang diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah yang merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta penghormatan Hak Asasi manusia</li> <li>• Menciptakan kondisi kehidupan politik yang demokratis</li> <li>• Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum</li> </ul>
	5.5. Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat	Kesatuan bangsa dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan hukum yang konsisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi</li> <li>• Meningkatkan partisipasi</li> </ul>

			<p>masyarakat dalam penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kerjasama pemerintah dengan lembaga legislatif dan yudikatif</li> <li>• Mewujudkan penurunan angka tindakan pidana</li> <li>• Menetapkan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perda, melalui penguatan jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul>
	5.6. Meningkatkan Kemanan dan ketertiban umum	Kesatuan bangsa dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengikutsertaan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan ketertiban umum</li> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kantibmas yang lebih baik</li> <li>• Menyiapkan sistem tanggap darurat jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum</li> <li>• Mewujudkan penguatan kelembagaan Linmas yang lebih profesional</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas saran prasarana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban umum</li> <li>• Meningkatkan kualitas anggota Linmas</li> </ul>